



RENJA OPD TAHUN 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan Renja 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD

tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
- Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah, dengan Renja K/L dan Renja dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Badan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisa Kinerja-Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

BAB V

PENUTUP

➤ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

➤ Kaidah-kaidah pelaksanaan

➤ Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Desember 2022 dalam table Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kabupaten Lombok Tengah

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		
					Target	Realisasi s.d Desember	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi s.d Desember	Tingkat Realisasi
1	2	3	4		5	5	6	7	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	CC	B	B	100%	B	B	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen	1 Tahun	33 Dokumen	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	15 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1 Tahun	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	10 Dokumen	100%
3	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	1 Tahun	100%	100%	100%	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan pemerintahan daerah	100%	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	50%	100%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	315.849.254.877	154.088.985.754,09	315.849.210.525	235.275.587.844,28	72.47%	315.849.210.525	101.589.582.873,1	32.16%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan	100%	1 Tahun	100%	25.50%	25.50%	100%	50.00%	50.00%

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/kegiatan pada tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Desember

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada semua program kinerja yang telah dicapai rata-rata diatas 85%, bahkan untuk pencetakan SPPT dan DHKP serta STTS telah mencapai 100%.

Capaian Realisasi PAD Bappenda, dari target Rp 315.849.210.525 realisasinya mencapai Rp 235.275.587.844,28 atau 72.47%.

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. Database Wajib Pajak PBB-P2 belum dilakukan pemuktahiran.
2. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah, sehingga wajib pajak masih banyak yang belum melakukan pembayaran berakibat bertambahnya piutang.
3. Belum sadarnya beberapa Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Pengelola PAD.
5. Aplikasi yang ada saat ini belum dapat difungsikan dalam pembuatan laporan realisasi dan instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB P2 serta belum dapat terintegrasi dengan pelayanan BPHTB.
6. Jumlah juru pungut masih kurang karena adanya juru pungut yang memasuki masa pensiun, belum ada penggantinya yang menjadi Juru Pungut.
7. Dukungan operasional masih belum maksimal khususnya untuk juru pungut/sedahan (BBM dan Kendaraan).

2.2 Analisa Kinerja-Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dimana dalam NSPK dan SPM tidak ada kinerja pada Bappenda Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan terhadap IKK kinerja yang ada pada Bappenda yaitu target PAD kabupaten Lombok Tengah, dimana target PAD sebesar Rp 324.661.748.370 Realisi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 235.275.587.844,28 atau 72.47%.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra		Proyeksi	
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	5	7	6	7	-	7	6
	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah			10.58	11.18	12.04	13.00	-	-	12.04	13.00
	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD %			13.56	9.74	7.70	7.97	-	-	7.70	7.97
	Realisasi Penerimaan PAD			232.385.801.437	255.029.352.732	274.656.988.0932	296.534.737.098	153.696.218.654,09	97.443.687.125,85	274.656.9880932	296.534.737.098

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

a) Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan cukup baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pelayanannya. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Pungut dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Pungut dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

b) Berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya akan berdampak pada upaya pencapaian optimalisasi pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah di kabupaten Lombok Tengah. Adapun isu yang dapat muncul berdasarkan isu yang dianggap krusial tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel Melati/Homestay
2. Keterbukaan WP terhadap Omzet penerimaan rendah
3. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang Tax atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.
4. Penetapan NPOP untuk pemindahan hak sesuai Pasal 85 ayat 2 point a (selain diluar pelepasan Hak)
5. Tidak meratanya pembangunan antara wilayah Utara dan wilayah Selatan

c) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

1. Tantangan:

- Lemahnya koordinasi antar Dinas/Instansi terkait;
- Kesadaran wajib pajak masih kurang;
- Adanya persaingan antar daerah;
- Belum Maksimalnya komitmen Dinas/Instansi Pengelola PAD dalam pencapaian target;
- Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah, sehingga wajib pajak masih banyak yang belum melakukan pembayaran berakibat bertambahnya piutang.
- Pengawasan terhadap Wajib pajak terkait transaksi masih belum maksimal.

2. Peluang:

- Adanya perundang-undangan/Perda yang mendukung;
- Adanya pembangunan infrastruktur yang berskala besar dan pengembangan pariwisata dan dunia usaha;
- Adanya pengembangan obyek pariwisata dan perdagangan;
- Adanya peningkatan obyek wajib pajak setiap tahunnya;
- Adanya event internasional.

e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk memecah isu-isu penting, rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai;

2. Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan SKPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja SKPD pengelola PAD dapat meningkat.
3. Meninjau ulang NJOP PBB P2 dalam rangka meningkatkan target PAD.
4. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan Pajak dan Bimtek lainnya.
5. Bekerjasama dengan BKPP untuk membuat surat himbauan kepada Seluruh ASN agar membayar SPPT PBB-P2.
6. Pemutakhiran database terhadap semua Subyek dan Obyek Pajak dan retribusi dengan tujuan mengurangi piutang piutang.
7. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank NTB (Smart Tax).
8. Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru.
9. Pemberian reward dan Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, maka kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis		
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Indikator	Target	Kebutuhan Dana
1	2	3	4		5	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B		B	B	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen	10.550.460	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen	39.936.820
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	18.162.241.947	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	18.162.241.947
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	714.411.322	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	994.969.873
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan pemerintahan daerah	100 %	79.548.000	Persentase Layanan pemerintahan daerah	100 %	79.548.000
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	111.988.790	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	146.027.000
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	315.849.210.525		Realisasi Penerimaan PAD	315.849.210.525	
	1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan	100 %	744.947.408	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan	100 %	1.458.012.253

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Voleme	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional, antara lain :

1. Pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan potensi ekonomi wilayah percepatan penguatan konektivitas penguatan kemampuan SDM dan IPTEK dan penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
2. Pengembangan kawasan perkotaan melalui percepatan pemenuhan pelayanan standar perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan adaptif terhadap bencana perwujudan kota cerdas dan daya saing kota peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan;
3. Pengembangan desa dan kawasan perdesaan melalui pemenuhan standar pelayanan minimum desa termasuk pemukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat desa pembangunan SDM dan pembentukan modal social budaya masyarakat desa Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan pengembangan ekonomi perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota;
4. Penanggulangan Bencana melalui Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Penurunan tingkat kerentanan

terhadap bencana Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

- a. Tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu Meningkatkan kemandirian fiskal dengan Indikator : Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator : Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%).

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	101.589.582.873,1	315.849.210.525

Catatan : Realisasi s.d Juni 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu
								9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	32 Laporan	6.408.700	APBD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	3 Laporan	15.200.880				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Lombok Tengah	1 tahun	4.075.440				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Haji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	127 Orang	17.403.279.101				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lombok Tengah	5 Laporan	2.553.480				
	Koordinasi dan Penyusunan Kaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lombok Tengah	18 Laporan	2.858.100				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lombok Tengah	3 Paket	434.749.153				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	1 Paket	1.328.910.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lombok Tengah	1 Paket	193.650.580				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok Tengah	3 Laporan	81.010.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lombok Tengah	12 Laporan	28.788.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	12 Laporan	61.440.000				

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lombok Tengah	1 Unit	25.563.920				
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lombok Tengah	96 Unit	151.114.440				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pedapatan Daerah								
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Lombok Tengah	12 Dokumen	74.355.220				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Lombok Tengah	10 Laporan	40.825.500				
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lombok Tengah	12 Laporan	205.265.067				
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Lombok Tengah	12 Dokumen	376.805.000				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Lombok Tengah	12 Dokumen	162.172.400				
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Lombok Tengah	4 Dokumen	60.758.910				
J u m l a h						20.677.783.891			

BAB V

PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Ada 2 Program, 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dimana tersebar dimasing- masing bidang dan di sekretariat yang saling mendukung satu sama lainnya. Kegiatan di bidang retribusi, bidang pajak, membutuhkan dukungan dari sekretariat baik dari segi data maupun peralatan lainnya sehingga anggaran yang satu bidang dengan bidang yang lain saling terkait dan akan mempengaruhi realisasi penerimaan.

2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Renja tahun 2024 ini akan menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tupoksinya dengan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan Renja Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
- Penyusunan Renja ini berpedoman dari Renstra Bappenda dan RPJMD serta RKPD Kab. Lombok Tengah.
- Target PAD Tahun 2024 disusaikan dengan hasil verifikasi SKPD pengelola PAD.

- Rencana Kerja (Renja) BAPPENDA selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BAPPENDA Tahun 2024 tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Disamping itu Renja BAPENDA juga memberi umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
- Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Praya, 10 Juli 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BO. ALUH WINDAYU W, SE.,MM

Nip. 197307291997032008